



EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP, MODEL, KRITERIA, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Rizky Fadillah¹, Eli Saprihfa², Sahrial Harun Paturahman³, Ramanda Aryan Febriadi⁴, Abel Renata⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Suska Riau, Indonesia

E-mail: rizkifadillah517@gmail.com¹, eli.saprihfa@uin-suska.ac.id²,

sahrialnasution973@gmail.com³, febriadiryan45@gmail.com⁴, abelxhype2004@gmail.com⁵

Received 15-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 17-06-2025

Abstract

This study aims to examine in depth the concept of Islamic education policy evaluation, explore various relevant evaluation models, and establish appropriate assessment criteria in the context of Islamic educational institutions. In addition, this study also seeks to identify the challenges that arise during the implementation of such policy evaluations in the field. The method used in this study is a literature review utilizing scientific journals, books, and other relevant references related to the topic of Islamic education policy evaluation. Data was collected through primary and secondary source searches, which were then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of the study indicate that the evaluation of Islamic education policy must be based on the principles of Sharia and the objectives of Islamic education (maqashid al-ta'lim), using evaluation models such as CIPP (Context, Input, Process, Product) or Stufflebeam Evaluation. However, in its implementation, there are still many obstacles, such as a lack of awareness of the importance of evaluation, limited competent human resources, and minimal budgetary support.

Keywords: Policy evaluation, Islamic education, evaluation model, evaluation criteria

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep evaluasi kebijakan pendidikan Islam, mengeksplorasi berbagai model evaluasi yang relevan, serta menetapkan kriteria penilaian yang sesuai dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul selama proses implementasi evaluasi kebijakan tersebut di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Data dikumpulkan melalui pencarian sumber primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan pendidikan Islam (maqashid al-ta'lim), dengan menggunakan model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) atau Evaluasi Stufflebeam. Namun, dalam implementasinya, masih banyak kendala seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya evaluasi, terbatasnya SDM yang kompeten, dan minimnya dukungan anggaran.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pendidikan Islam, model evaluasi, kriteria evaluasi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan karakter umat. Fungsi utamanya tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang memiliki keimanan kuat, ketakwaan mendalam, serta akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan ini selaras dengan konsep maqashid al-ta'lim, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan manusia sempurna (*al-insān al-kāmil*) yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosialnya (Farhana, 2024). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menjadi dasar bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan secara benar dan bertujuan meningkatkan martabat manusia di hadapan Allah dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menekankan pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, maupun penyelenggara pendidikan Islam senantiasa merancang dan menjalankan berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki sistem pengajaran, menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan zaman, serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Namun, meskipun banyak kebijakan telah dirancang dengan baik, sering kali hasilnya tidak sesuai ekspektasi karena adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Salah satu faktor krusial yang turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses penting yang dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari sebuah kebijakan (Nadila, 2023). Tanpa evaluasi yang tepat, maka sulit untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai benar-benar tercapai atau justru menyimpang dari rencana awal. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Mujib dkk., yang menyatakan bahwa pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui proses evaluasi (Sa'diyah, 2022). Artinya, evaluasi menjadi alat ukur untuk menilai seberapa besar tujuan pembelajaran berhasil dicapai oleh siswa setelah kebijakan tertentu diterapkan.

Evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme refleksi dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Setiap program yang telah dirumuskan dan diimplementasikan perlu dievaluasi secara berkala guna mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan pada tahap selanjutnya (Nasution et al., 2025). Proses ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan pendidikan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi para

pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, guru, serta masyarakat luas. Dalam dunia pendidikan, evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Penilaian tidak cukup hanya mengacu pada aspek kognitif atau prestasi akademik, tetapi juga harus menyentuh ranah afektif dan psikomotorik, terutama dalam hal pembentukan moral dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, model dan metode evaluasi yang digunakan pun harus disesuaikan dengan filosofi dan tujuan pendidikan Islam yang holistik.

Seiring dengan perkembangan teori dan praktik evaluasi, berbagai model evaluasi telah dikembangkan oleh pakar pendidikan. Salah satunya adalah Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam (Putra & Qomariyah, 2024). Model ini memberikan kerangka kerja yang lengkap dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, mulai dari analisis situasi awal hingga hasil akhir yang dicapai. Selain itu, ada juga model evaluasi Stake, yang lebih menekankan pada respon stakeholder, serta model evaluasi responsif yang memberikan ruang bagi dinamika dan perubahan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Tokoh pendidikan Islam seperti Hasan Langgulung dan Ahmad Tafsir turut memberikan kontribusi penting dalam pemikiran evaluasi pendidikan (Muvid et al., 2020). Langgulung menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan insan yang memiliki kesadaran spiritual dan kemampuan intelektual yang seimbang. Sementara Ahmad Tafsir menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam pendidikan Islam, sehingga evaluasi tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga aspek moral dan sosial.

Meski begitu, dalam praktiknya, evaluasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman para pelaku pendidikan mengenai konsep dasar evaluasi itu sendiri. Banyak kalangan pendidikan Islam yang masih menganggap evaluasi hanya sebagai aktivitas formalistik, seperti tes akhir semester atau rapor siswa, tanpa menyadari bahwa evaluasi mencakup proses yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki pedoman evaluasi yang baku dan spesifik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Prayitno & Ashari, 2023). Kurangnya standar evaluasi yang jelas menyebabkan hasil evaluasi tidak bisa menjadi acuan yang valid untuk perbaikan kebijakan. Tidak jarang, evaluasi dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan matang, sehingga hasilnya tidak objektif dan tidak dapat diandalkan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Banyak sekolah dan madrasah yang belum memiliki tenaga ahli dalam bidang evaluasi pendidikan, sehingga proses evaluasi dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh. Selain itu, minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi yang profesional membuat banyak institusi pendidikan Islam tidak mampu melakukan evaluasi secara maksimal (Akhyar, 2024). Masih banyak pula kasus di lapangan di mana kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap evaluasi. Mereka lebih fokus

pada pencapaian target administratif daripada pada peningkatan kualitas pendidikan secara substantif. Akibatnya, evaluasi cenderung dilakukan sebagai formalitas belaka, tanpa adanya upaya untuk merealisasikan rekomendasi yang muncul dari hasil evaluasi tersebut.

Melihat kondisi tersebut, tulisan ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam. Pembahasan akan mencakup konsep dasar evaluasi, model-model evaluasi yang relevan, kriteria evaluasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lembaga pendidikan. Dengan adanya telaah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas evaluasi kebijakan pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai metode utama dalam mengkaji objek penelitian, yaitu evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Metode ini dipilih karena fokus penelitian lebih kepada analisis teoretis dan konseptual terhadap berbagai konsep, model, kriteria, serta tantangan implementasi evaluasi dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Studi literatur dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat reflektif, normatif, dan tidak memerlukan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur primer seperti buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dokumen kebijakan, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi klasik dalam pemikiran pendidikan Islam (Fariq et al., 2022). Selain itu, juga digunakan sumber sekunder sebagai pelengkap informasi, termasuk makalah seminar, laporan penelitian, dan bahan ajar yang relevan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur yang membahas konsep evaluasi dalam pendidikan, model-model evaluasi, kriteria penilaian, serta tantangan implementasi di lembaga pendidikan Islam. Data dikumpulkan melalui perpustakaan fisik maupun digital, database jurnal ilmiah, situs resmi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, serta repositori institusi pendidikan tinggi yang menyediakan akses terbuka (*open access*). Setiap sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan validitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai konsep evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Proses analisis mengacu pada langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Penyaringan informasi yang relevan dengan tema penelitian dari seluruh sumber yang telah dikumpulkan.
2. Kategorisasi Informasi: Pengelompokan data berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti konsep evaluasi, model evaluasi, kriteria, serta tantangan implementasi.
3. Sintesis dan Interpretasi: Menghubungkan dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang logis dan konsisten.
4. Verifikasi: Membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memperkuat kesimpulan dan memastikan bahwa analisis memiliki dasar teoretis yang kuat.

Dalam rangka mempertahankan kredibilitas dan validitas penelitian, setiap kutipan atau gagasan yang berasal dari sumber lain selalu disertai dengan rujukan lengkap sesuai dengan aturan penulisan akademik. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap beberapa literatur untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibangun tidak bersifat subjektif, tetapi didasarkan pada pandangan para ahli di bidang pendidikan Islam dan evaluasi kebijakan. Metode ini meskipun tidak melibatkan observasi atau wawancara langsung, tetap memiliki nilai akademik yang tinggi karena berlandaskan pada kajian yang sistematis dan mendalam atas berbagai sumber yang saling berhubungan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menjadi fondasi teoretis yang kokoh untuk memahami dinamika evaluasi kebijakan pendidikan Islam di lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Evaluasi Secara Bahasa dan Istilah

Kata “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris *to evaluate*, yang berarti menilai atau mengukur nilai sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi diartikan sebagai proses menentukan nilai guna suatu objek tertentu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Kata ini memiliki akar kata Latin yaitu *valere* yang berarti bernilai atau berguna (Sawaluddin, 2018). Secara istilah, evaluasi merujuk pada proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan dalam rangka membuat penilaian terhadap suatu program, kebijakan, atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, efektivitas penggunaan sumber daya, serta dampak jangka pendek maupun panjang dari kebijakan tersebut.

Dalam dunia pendidikan, evaluasi menjadi alat penting untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ia merupakan salah satu komponen tak terpisahkan dari siklus pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi itu sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya bersifat teknis seperti yang banyak ditemukan dalam pendidikan umum, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan spiritual. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara aspek aqliyah (intelektual), nafsaniyah (emosional), ruhiyah (spiritual), dan jasadiyah (fisik). Oleh karena itu, konsep evaluasi

dalam pendidikan Islam harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistik.

Hal ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa pendidikan harus bertujuan untuk membentuk manusia sempurna (al-insān al-kāmil) yang mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Irawan, 2020). Dengan demikian, evaluasi tidak cukup hanya mengukur penguasaan materi pelajaran atau hasil ujian, tetapi juga harus mampu menggambarkan perkembangan moral, akhlak, dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ahli pendidikan memberikan definisi dan perspektif berbeda mengenai evaluasi, namun intinya tetap sama: evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan.

1. Suryabrata menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya sistematis untuk menentukan nilai atau derajat suatu program atau kebijakan berdasarkan data dan informasi tertentu (Awalliyah, 2022). Menurutnya, evaluasi bukan sekadar tes atau ujian, tetapi lebih luas mencakup analisis terhadap semua aspek yang terlibat dalam proses pendidikan.
2. Nana Syaodih Sukmadinata menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari setiap program pendidikan (Indana & Nurvita, 2020). Fungsinya adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan atau program. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi peserta didik dan lembaga pendidikan secara keseluruhan.
3. Abdul Mujib dkk. menyebutkan bahwa evaluasi merupakan instrumen untuk mengetahui apakah kompetensi yang diharapkan oleh peserta didik telah tercapai setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya, evaluasi bukan sekadar alat untuk memberikan angka atau peringkat, tetapi lebih pada upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
4. Daniel Stufflebeam, pengembang model CIPP, menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipercaya. Ia percaya bahwa evaluasi harus dilakukan untuk mendukung perbaikan program, bukan sekadar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan.
5. Robert Stake, tokoh evaluasi pendidikan, mengemukakan bahwa evaluasi harus mempertimbangkan perspektif para pemangku kepentingan (stakeholders). Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak bisa dinilai hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari respon dan pengalaman mereka yang terlibat langsung dalam implementasi.

Evaluasi dalam pendidikan Islam memiliki fungsi yang sangat strategis. Selain sebagai alat ukur pencapaian tujuan, evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme refleksi dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Setiap program yang telah dirancang dan diimplementasikan perlu dievaluasi secara berkala guna mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan pada tahap selanjutnya. Jika evaluasi dilakukan

secara menyeluruh dan objektif, maka akan menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk penyempurnaan kebijakan, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun manajemen lembaga pendidikan.

Model Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanggung jawab besar dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan. Selama ini, Kemenag sering kali mengikuti arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud), khususnya dalam hal standar nasional pendidikan dan kurikulum. Namun, dalam aspek evaluasi, Kemenag membutuhkan pendekatan khusus yang sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan Islam. Evaluasi dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak, tetapi juga untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan model evaluasi yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, model evaluasi harus mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah, tujuan pendidikan Islam (*maqashid al-ta'lim*), serta dinamika sosial budaya masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada.

1. Model Evaluasi Berorientasi Tujuan (*Goal Oriented Evaluation*)

Model ini dikembangkan oleh Ralph Tyler, seorang tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi (Isri, 2021, p. 108). Dalam model ini, evaluasi dilakukan dengan fokus pada pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi dimulai dengan merumuskan tujuan secara jelas, kemudian menentukan indikator keberhasilan, serta mengumpulkan data selama pelaksanaan program. Model Tyler sangat cocok diterapkan dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang memiliki tujuan spesifik, seperti penguatan pemahaman aqidah, peningkatan keterampilan ibadah, atau pembentukan akhlak mulia. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tahapan program mendekati peserta didik pada tujuan tersebut.

2. Model Evaluasi Tanpa Fokus pada Tujuan (*Goal-Free Evaluation*)

Berbeda dengan model Tyler, Michael Scriven mengembangkan konsep *Goal-Free Evaluation*, di mana evaluator tidak dibatasi oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Model ini bertolak belakang dengan pendekatan tradisional yang terlalu fokus pada pencapaian target tertentu (Rhamayanti, 2021). Menurut Scriven, evaluasi seharusnya tidak hanya melihat apakah tujuan telah tercapai, tetapi juga mencari dampak-dampak yang tidak direncanakan (*unintended outcomes*) sebagai hasil dari suatu program. Model ini sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam yang bersifat holistik dan nilai-nilainya sering kali tidak mudah diukur secara kuantitatif. Misalnya, ketika

suatu kebijakan diimplementasikan untuk meningkatkan disiplin shalat berjamaah di madrasah, ternyata muncul efek sampingan berupa peningkatan rasa solidaritas siswa atau peningkatan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Efek-efek semacam ini bisa saja tidak termasuk dalam tujuan awal, namun tetap penting untuk dievaluasi sebagai bagian dari dampak keseluruhan kebijakan.

3. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (*Formative and Summative Evaluation*)

Scriven juga mengembangkan model evaluasi yang membagi waktu pelaksanaannya menjadi dua fase, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi Formatif, dilakukan selama program masih berlangsung, bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pelaksanaan kebijakan (Maksum & Arifin, 2022). Contohnya adalah monitoring mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan kurikulum baru di madrasah. Sedangkan Evaluasi Sumatif, dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, bertujuan untuk menilai keseluruhan hasil dan dampak kebijakan. Contohnya adalah penilaian akhir terhadap capaian prestasi akademik dan akhlak siswa setelah satu tahun pelaksanaan kebijakan. Penerapan model ini dalam pendidikan Islam sangat membantu dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dinilai saat program sudah selesai, tetapi juga terus dipantau dan diperbaiki selama proses berlangsung.

4. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan merupakan salah satu model evaluasi yang paling komprehensif dalam dunia pendidikan. Model CIPP terdiri dari empat dimensi utama (Nukhbatillah et al., 2024):

- a. *Context Evaluation*: Fase ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi awal atau latar belakang sebelum kebijakan diterapkan. Termasuk di dalamnya analisis terhadap kebutuhan, masalah, serta potensi yang ada di lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, tahap ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan realita lapangan, misalnya rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai akhlak.
- b. *Input Evaluation*: Tahap ini menilai sumber daya, strategi, serta rencana pelaksanaan kebijakan. Di sinilah Kemenag berperan penting dalam menyediakan pedoman, kurikulum, serta tenaga pendidik yang sesuai dengan prinsip pendidikan Islam.
- c. *Process Evaluation*: Proses pelaksanaan kebijakan menjadi fokus pada tahap ini. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai rencana? Bagaimana respon peserta didik dan guru? Apakah ada kendala selama implementasi? Dalam pendidikan Islam, proses evaluasi sangat penting karena banyak aspek pendidikan seperti pembentukan akhlak tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir.
- d. *Product Evaluation*: Tahap akhir ini menilai hasil atau dampak dari kebijakan setelah periode tertentu. Misalnya, apakah kualitas pembelajaran meningkat? Apakah perilaku siswa lebih baik? Apakah mutu lulusan madrasah lebih kompetitif?

Model CIPP sangat cocok digunakan dalam evaluasi kebijakan besar seperti revisi kurikulum pendidikan Islam, pengembangan program ekstrakurikuler bernuansa keislaman, atau pelatihan guru berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis.

5. Model Evaluasi Stake

Berbeda dengan model CIPP yang bersifat struktural dan sistematis, Model Evaluasi Stake lebih menitikberatkan pada perspektif para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menilai keberhasilan suatu program (Yusril, 2019, p. 47). Pendekatan ini lebih humanis dan partisipatif, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan Islam yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang tinggi. Fokus utama dari model ini adalah:

- a. Menyimak aspirasi dan harapan para stakeholder seperti siswa, orang tua, guru, dan tokoh agama.
- b. Melihat bagaimana mereka merasakan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengevaluasi apakah kebijakan tersebut menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai contoh, ketika Kemenag mengeluarkan kebijakan wajib shalat dzuhur berjamaah di madrasah, model Stake akan melihat bagaimana respons guru, siswa, dan orang tua terhadap kebijakan tersebut. Apakah mereka merasa bahwa kebijakan tersebut membawa perubahan positif dalam sikap keagamaan siswa? Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya?. Model ini sangat berguna dalam mengevaluasi kebijakan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal, seperti program pendidikan keluarga berbasis masjid atau penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam.

6. Model Evaluasi Responsif

Model evaluasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan dinamisnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbeda dengan model sebelumnya yang lebih terstruktur, Model Evaluasi Responsif memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan proses evaluasi dengan konteks lokal dan perkembangan situasi di lapangan (Pratama & Febriani, 2024). Ciri utama dari model ini adalah: Sensitif terhadap perubahan dan dinamika lokal, Fleksibel dalam menyesuaikan indikator evaluasi, dan Mendorong evaluator untuk terlibat aktif dalam proses implementasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan Islam, model ini sangat tepat diterapkan di daerah dengan keragaman budaya, adat, dan cara pandang keagamaan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan kurikulum baru di madrasah di Aceh mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penerapannya di Jawa Tengah. Model evaluasi responsif memungkinkan evaluator untuk menyesuaikan metode dan instrumen evaluasi agar tetap relevan dengan kondisi setempat.

Ketiga model evaluasi *Goal Oriented*, *Goal-Free*, dan *Formatif-Sumatif* serta model-model tambahan seperti CIPP, Stake, dan Responsif, memiliki prinsip dasar yang berbeda, namun sama-sama bermanfaat dalam memahami efektivitas dan dampak kebijakan

pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kombinasi beberapa model evaluasi sering kali diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan valid. Kemenag, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Islam, dapat menggunakan pendekatan campuran ini dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Misalnya, menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi struktur dan implementasi kebijakan, model Stake untuk melihat respons masyarakat, dan model responsif untuk menyesuaikan evaluasi dengan konteks lokal. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya menjadi alat ukur keberhasilan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Kriteria Evaluasi dalam Pendidikan Islam

Dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan Islam, kriteria evaluasi menjadi parameter penting untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan pendidikan telah berhasil sesuai harapan. Berbeda dengan pendidikan umum yang cenderung lebih fokus pada aspek akademik dan prestasi siswa, kriteria evaluasi dalam pendidikan Islam harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana prinsip *maqashid al-ta'lim*, yaitu tujuan utama pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia sempurna (*al-insān al-kāmil*). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga perkembangan moral, spiritual, serta perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kesesuaian dengan Tujuan Pendidikan Islam (Maqashid Al-Ta'lim)

Salah satu kriteria utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah kesesuaian dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu *maqashid al-ta'lim*. Tujuan ini mencakup penguatan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pembentukan kepribadian islami yang berakhlak mulia, pengembangan kemampuan intelektual, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan (Mediawati, 2023). Jika suatu kebijakan tidak mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan. Misalnya, jika kurikulum baru menyebabkan berkurangnya waktu pembelajaran materi agama, maka hal ini dapat dinilai tidak selaras dengan prinsip pendidikan Islam.

2. Peningkatan Kompetensi Peserta Didik (Akademik & Karakter)

Kompetensi lulusan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, kompetensi tidak hanya diukur dari pencapaian akademik semata, tetapi juga dari pemahaman dan praktik ajaran agama seperti kemampuan membaca Al-Quran, pelaksanaan ibadah wajib, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah jujur, amanah, sabar, dan rendah hati (Shalahudin et al., 2020). Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan baik di madrasah maupun masyarakat menjadi bagian integral dari pengukuran kompetensi siswa secara holistik.

3. Respons Positif dari Stakeholder Pendidikan

Respons positif dari para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan indikator penting dalam mengevaluasi sebuah kebijakan pendidikan. Stakeholder dalam pendidikan Islam meliputi guru, siswa, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Respons mereka bisa dilihat dari tingkat kepuasan terhadap metode pembelajaran, kesediaan untuk mendukung program, serta adanya perubahan positif pada diri siswa. Model evaluasi seperti Model Stake sangat relevan digunakan untuk mengukur respon ini, karena menempatkan pandangan dan harapan stakeholder sebagai pusat analisis.

4. Peningkatan Mutu SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Kriteria ini mencakup peningkatan kapasitas guru dalam menyampaikan materi agama, pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, penggunaan strategi pembelajaran inovatif yang tetap berlandaskan syariah, serta kepribadian guru yang menjadi teladan bagi peserta didik. Evaluasi dilakukan melalui observasi kelas, penilaian kinerja, dan umpan balik dari siswa serta rekan sejawat.

5. Keberlanjutan dan Replikasi Program

Sebuah kebijakan pendidikan dikatakan efektif jika memiliki daya tahan tinggi dan dapat direplikasi di lembaga lain. Kriteria ini mencakup kemampuan program untuk tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan atau perubahan kebijakan, kemudahan dalam menyesuaikan program dengan konteks lokal, serta tersedianya dokumentasi dan pedoman yang memadai untuk replikasi di institusi pendidikan lain. Kemenag memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan layak ditiru oleh madrasah-madrasah lain.

6. Relevansi dengan Konteks Sosial Budaya Lokal

Pendidikan Islam berkembang dalam berbagai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kriteria evaluasi harus mencakup sejauh mana kebijakan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal tanpa mengurangi esensi ajaran Islam. Beberapa aspek yang dinilai meliputi penerimaan masyarakat terhadap model pembelajaran baru, adaptasi program terhadap adat dan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Kriteria ini sangat relevan dengan model evaluasi responsif yang memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan instrumen evaluasi dengan realita lapangan.

7. Ketercapaian Indikator Nasional dan Standar Nasional Pendidikan Islam

Selain kriteria normatif dan filosofis, evaluasi kebijakan pendidikan Islam juga harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemenag sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam memiliki kerangka kerja evaluasi yang disusun berdasarkan delapan standar nasional pendidikan: Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (Umam, 2020). Dengan menggunakan kerangka ini sebagai acuan, Kemenag dapat membandingkan capaian madrasah dengan standar minimal yang telah ditentukan, serta merancang intervensi yang tepat jika ada indikator yang belum terpenuhi.

8. Dampak Jangka Panjang terhadap Pembentukan Akhlak Siswa

Salah satu tantangan terbesar dalam evaluasi pendidikan Islam adalah mengukur dampak jangka panjang terhadap pembentukan akhlak siswa. Meski sulit diukur secara kuantitatif, perubahan perilaku seperti disiplin dalam menjalankan ibadah, rasa hormat terhadap guru dan sesama, tanggung jawab sosial, serta integritas dalam hidup sehari-hari menjadi tolok ukur utama keberhasilan pendidikan Islam. Oleh karena itu, evaluasi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menangkap perubahan-perubahan tersebut, baik secara langsung melalui observasi maupun secara tidak langsung melalui penilaian oleh guru dan orang tua.

Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta kebutuhan masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya, evaluasi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi, melibatkan aspek manusia, struktur organisasi, sumber daya, hingga budaya lembaga pendidikan.

1. Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Evaluasi

Salah satu tantangan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku pendidikan terhadap fungsi evaluasi itu sendiri. Banyak kalangan pendidikan Islam masih memandang evaluasi sebagai aktivitas formalistik semata, seperti tes akhir semester atau pembuatan laporan administratif tahunan. Padahal, evaluasi seharusnya menjadi mekanisme reflektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Pemahaman yang sempit ini menyebabkan proses evaluasi dilakukan secara parsial dan tidak sistematis. Akibatnya, hasil evaluasi tidak memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan, tetapi hanya menjadi dokumen wajib yang disimpan tanpa tindak lanjut.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli dalam Bidang Evaluasi

Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, belum memiliki tenaga ahli yang memahami konsep dan teknik evaluasi secara mendalam. Guru dan kepala sekolah umumnya lebih fokus pada pengajaran dan manajemen operasional, sementara pengetahuan tentang metode evaluasi program masih sangat terbatas (Arifudin et al., 2017). Keterbatasan SDM ini membuat banyak kebijakan pendidikan Islam dievaluasi secara spontan, tanpa instrumen yang valid, indikator yang jelas, atau prosedur yang objektif. Hal ini tentu saja mengurangi kredibilitas hasil evaluasi dan menyulitkan adanya rekomendasi perbaikan yang berbasis data.

3. Kurangnya Pedoman Evaluasi Spesifik untuk Pendidikan Islam

Selama ini, pedoman evaluasi yang digunakan oleh lembaga pendidikan Islam cenderung mengacu pada kerangka kerja pendidikan umum yang dikembangkan Kemdikbud. Meskipun berguna untuk standar akademis, kerangka tersebut kurang mewakili dimensi normatif dan spiritual yang menjadi esensi dari pendidikan Islam. Akibatnya, banyak evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang gagal mengukur dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa, penguasaan ilmu agama, atau penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari (Nur & Junaris, 2023). Diperlukan pedoman evaluasi yang spesifik, disusun oleh Kemenag bekerja sama dengan pakar pendidikan Islam, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan holistik.

4. Terbatasnya Anggaran untuk Evaluasi Profesional

Evaluasi yang baik memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk berbagai kebutuhan seperti pelatihan evaluator, pengadaan instrumen evaluasi, biaya survei lapangan, serta analisis data yang komprehensif. Sayangnya, banyak institusi pendidikan Islam, terutama yang berada di daerah tertinggal, tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan evaluasi secara profesional. Akibat minimnya dukungan finansial, evaluasi sering kali dilakukan secara seadanya, menggunakan instrumen sederhana, dan tanpa melibatkan evaluator independen. Hasilnya pun cenderung bias, tidak representatif, dan tidak bisa menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan kebijakan.

5. Kurangnya Komitmen Pimpinan Lembaga

Masih banyak kasus di lapangan di mana pimpinan lembaga pendidikan Islam kepala madrasah, rektor perguruan tinggi keagamaan, atau pengurus yayasan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap evaluasi. Mereka lebih fokus pada pencapaian target administratif daripada pada peningkatan kualitas pendidikan secara substantif (Mu'min, 2022). Kurangnya komitmen ini tercermin dari sikap pasif dalam merancang instrumen evaluasi, tidak proaktif dalam melibatkan stakeholder, hingga enggan mengambil langkah konkret untuk merealisasikan rekomendasi hasil evaluasi. Tanpa dukungan pimpinan yang kuat, evaluasi cenderung menjadi ritual tahunan yang tidak memiliki dampak signifikan.

6. Dominasi Pendekatan Formalistik dalam Proses Evaluasi

Dalam banyak kasus, evaluasi kebijakan pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek administratif dan dokumentasi daripada pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Laporan evaluasi dibuat sebagai persyaratan formal tanpa diiringi upaya sungguh-sungguh untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara mendalam. Pendekatan formalistik ini membuat evaluasi tidak sensitif terhadap dinamika lokal, tidak mampu menangkap perubahan perilaku siswa secara riil, dan tidak memberikan masukan yang bernilai untuk penyempurnaan kebijakan. Evaluasi seharusnya bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga refleksi kolektif untuk perbaikan pendidikan.

7. Kesulitan dalam Mengukur Dampak Jangka Panjang terhadap Pembentukan Karakter Siswa

Salah satu tantangan tersulit dalam evaluasi pendidikan Islam adalah mengukur dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter siswa. Berbeda dengan aspek akademis yang mudah diukur melalui ujian dan penilaian prestasi, pembentukan karakter islami merupakan proses panjang yang tidak selalu tampak secara langsung. Hal ini membuat banyak evaluator sulit menetapkan indikator yang valid dan reliabel untuk mengukur perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perlu dikembangkan instrumen evaluasi yang lebih holistik, termasuk observasi perilaku, penilaian oleh guru dan orang tua, serta studi longitudinal untuk melihat perubahan jangka panjang.

8. Rendahnya Partisipasi Stakeholder dalam Proses Evaluasi

Evaluasi yang baik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar (Kuniyo & Larasati, 2019). Sayangnya, partisipasi stakeholder dalam proses evaluasi masih relatif rendah. Banyak pihak yang tidak merasa terlibat atau tidak mengetahui pentingnya evaluasi dalam perbaikan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan data yang dikumpulkan tidak lengkap atau bias karena hanya berasal dari segelintir aktor pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi stakeholder dalam proses evaluasi agar hasilnya lebih representatif dan dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih baik.

9. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Penunjang Evaluasi

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam bidang evaluasi. Sayangnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung evaluasi yang modern dan efektif (Aliah & Warsah, 2021). Kurangnya akses internet, perangkat teknologi, serta kapasitas SDM dalam memanfaatkan sistem informasi pendidikan menyebabkan proses pengumpulan dan analisis data evaluasi masih dilakukan secara manual dan tidak maksimal. Padahal, teknologi dapat mempercepat proses evaluasi, memperluas jangkauan data, serta meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh.

10. Kesenjangan antara Kebijakan dan Realita Lapangan

Beberapa kebijakan pendidikan Islam dirancang tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, sehingga saat dievaluasi, hasilnya justru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak relevan atau tidak efektif. Misalnya, kebijakan tentang penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman sering kali sulit diterapkan karena keterbatasan sumber daya atau ketidakcocokan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesenjangan antara teori dan praktik ini menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan proses evaluasi, karena kebijakan yang tidak realistis akan sulit diimplementasikan, apalagi dinilai keberhasilannya.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam merupakan komponen penting dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing lembaga pendidikan Islam di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Proses evaluasi tidak hanya bertujuan untuk

mengetahui apakah suatu kebijakan telah tercapai atau tidak, tetapi juga untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan program. Dalam pembahasan sebelumnya, telah diuraikan konsep evaluasi yang mencakup pengertian, fungsi, dan tujuannya; model evaluasi yang relevan seperti CIPP, Stake, Goal-Free, Formatif-Sumatif, dan Responsif; kriteria evaluasi yang melibatkan peningkatan kompetensi siswa, respons positif stakeholder, serta pencapaian standar nasional; hingga tantangan implementasi yang meliputi minimnya kesadaran akan pentingnya evaluasi, terbatasnya SDM, kurangnya pedoman evaluasi spesifik, serta dominasi pendekatan formalistik dalam pelaksanaan evaluasi.

Meskipun berbagai model dan kriteria evaluasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala struktural maupun kultural. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan evaluasi secara profesional dan objektif. Selain itu, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, kurangnya dukungan anggaran, serta kesenjangan antara kebijakan dan realita lapangan turut memperparah kondisi ini. Namun demikian, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk mengabaikan pentingnya evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Justru, dengan adanya berbagai kendala tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak terutama Kementerian Agama, penyelenggara pendidikan, guru, dan masyarakat untuk membangun sistem evaluasi yang lebih baik dan bermakna.

SARAN

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam perlu ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman evaluasi yang spesifik untuk konteks pendidikan Islam, serta penguatan infrastruktur teknologi yang mendukung proses pengumpulan dan analisis data secara efektif. Selain itu, partisipasi aktif stakeholder seperti guru, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sekitar harus lebih ditingkatkan agar hasil evaluasi lebih representatif dan dapat diimplementasikan secara maksimal. Evaluasi juga sebaiknya dilakukan berbasis data lapangan dengan instrumen yang valid, serta dirancang secara longitudinal untuk menilai perkembangan karakter siswa secara jangka panjang.

Kementerian Agama dan instansi terkait perlu meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi yang profesional, termasuk biaya pelatihan evaluator, penyediaan instrumen, dan survei lapangan. Pemetaan konteks lokal harus menjadi bagian dari tahap perencanaan kebijakan agar instrumen evaluasi sesuai dengan realitas di lapangan. Komitmen pimpinan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam memastikan bahwa evaluasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari siklus kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, objektif, dan holistik, evaluasi akan berperan sebagai fondasi bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan Islam yang bermakna dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, 5(1), 711–717. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/917>
- Aliah, M., & Warsah, I. (2021). Evaluasi pembelajaran selama pandemi COVID-19: Tantangan dan solusi. *Jurnal As-Salam*, 5(2), 164–174. <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/333>
- Arifudin, A., Sudirman, S., & Andri, M. (2017). Evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia pada penempatan kerja petugas di UPT Puskesmas Lembasada. *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 1–14. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM/article/view/20>
- Awalliyah, A. P. (2022). *Pengembangan Instrument Assessment Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Mata Pelajaran Ekonomi Materi Perpajakan Kelas XI IPS Di SMA Negeri 4 Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/16408/>
- Farhana, N. (2024). Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12305>
- Fariq, W. M., Zamsiswaya, Z., & Tambak, S. (2022). Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method). *Journal Social Society*, 2(2), 75–84. <https://www.pusdig.my.id/jss/article/view/264>
- Indana, N., & Nurvita, L. (2020). Implementasi manajemen kurikulum pesantren di ponpes al urwatul wutsqo diwek jombang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 29–51. <https://stituwjombang.ac.id/jurnalstit/index.php/al-idaroh/article/view/129>
- Irawan, D. (2020). The urgency of religious education and its implications for the concept of human in the Islamic worldview. *At-Ta'dib*, 15(1). https://www.academia.edu/download/69591789/pdf_35.pdf
- Isri, S. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam. In BOOK (Ed.), *Semesta Aksara*, DIY Yogyakarta. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Kuniyo, S., & Larasati, D. C. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 104–119. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1794>
- Maksum, A., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 97–112. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/579>
- Mediawati, B. T. E. (2023). Transformasi nilai-nilai Islam melalui pendidikan pesantren: Implementasi dalam pembentukan karakter santri. *Journal of International*

- Multidisciplinary Research Vol, 1(1).
<https://pdfs.semanticscholar.org/93b5/f42bcbfbd7a886bb67f76950d6f41f42foee.pdf>
- Mu'min, L. (2022). Tantangan Manajemen Humas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 2 Bone. *Jurnal Mappesona*, 5(1), 1–10. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/2494>
- Muvid, M. B., Miftahuuddin, M., & Abdullah, M. (2020). Pendidikan Islam Kontemporer Perspektif Hasan Langgulung Dan Zakiah Darajat. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1).
<https://pdfs.semanticscholar.org/fd5d/747a8f811b5a7d635438of392b02b383ab20.pdf>
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113.
<https://jurnal.umbulukumba.ac.id/index.php/jpss/article/view/100>
- Nasution, I., Hakim, M., Ardilla, O., & Hasibuan, I. D. (2025). Model dan Praktik Evaluasi Program Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(3), 458–466.
<http://www.irje.org/irje/article/view/2649>
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalasari, N. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 2(1), 34–43. <http://glorespublication.org/index.php/globalistik/article/view/352>
- Nur, E., & Junaris, I. (2023). Evaluasi dan monitoring manajemen pembelajaran pendidikan Islam dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. *Refresh: Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 48–73. <https://jurnal.bhaktipersada.com/index.php/rmpi/article/view/23>
- Pratama, R., & Febriani, E. A. (2024). Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kearifan Lokal di SMAN 2 Kinali. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 3(4), 366–376.
<https://naradidik.ppj.unp.ac.id/index.php/nara/article/view/239>
- Prayitno, E., & Ashari, M. Y. (2023). Peran dan Fungsi Evaluasi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(1), 48–57.
<https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/8>
- Putra, A. T. A., & Qomariyah, E. (2024). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam Dan Implikasinya Pada Prestasi Lembaga Pendidikan:(Studi di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL Qalam). *Journal Publicuho*, 7(2), 627–642.
<http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/425>
- Rhamayanti, R. F. (2021). *Evaluasi program ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Legok Kabupaten Tangerang*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58775>
- Sa'diyah, T. (2022). Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk

- Karakter Pribadi Yang Islami. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Agama, Budaya Dan Terapan*, 2(3), 148–159.
<http://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kasta/article/view/408>
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 39–52.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/1775>
- Shalahudin, I., Saepulmillah, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2020). Analisis Kritik Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 170–188.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/35519/>
- Umam, M. K. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Persfektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8(1), 61–74. <https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/141>
- Yusril, A. (2019). *Proyeksi Perbankan di Era Disrupsi: Kajian Evaluasi dan Tantangan BRI Pekanbaru ke Depan*. Jakarta: Pustaka Kaji.